

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS  
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN  
PERMENDAGRI NO 77 TAHUN 2020**

*EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF CASH RECEIPT ACCOUNTING SYSTEMS AND  
PROCEDURES AT THE TOURISM SERVICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE BASED ON  
PERMENDAGRI NO 77 YEAR 2020*

Oleh:

**Nadya Putri Samuri<sup>1</sup>**  
**Jantje J Tinangon<sup>2</sup>**  
**Rudy J. Pusung<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

<sup>1</sup>[nadyasamuri@student.unsrat.ac.id](mailto:nadyasamuri@student.unsrat.ac.id)

<sup>2</sup>[Tinangonjannyjantje@yahoo.co.id](mailto:Tinangonjannyjantje@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>[rudypusung@yahoo.com](mailto:rudypusung@yahoo.com)

**Abstark:** Penerimaan kas adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas. Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Evaluasi penerapan sistem dan prosedur dilakukan dengan cara membandingkan antara teori-teori dan peraturan-peraturan dalam penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas dengan Permendagri no 77 tahun 2020. Berdasarkan dengan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa secara umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan kas sesuai ketentuan pada peraturan tersebut.

**Kata kunci:** evaluasi, sistem dan prosedur, penerimaan kas

**Abstract:** Receipt of cash is a transaction of receiving cash in cash which results in an increase in the company's assets in the form of cash. The purpose of this study was to evaluate the application of cash receipts accounting systems and procedures. Government accounting is the process of identifying, measuring, recording and reporting the economic transactions of corporate entities. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive analysis method. Evaluation of the application of systems and procedures is carried out by comparing the theories and regulations in implementing cash receipts systems and procedures with Permendagri no 77 of 2020. Based on this research, the results obtained are that in general the North Sulawesi Provincial Tourism Office has implemented systems and procedures for receiving cash in accordance with the provisions of the regulation.

**Keywords:** evaluation, systems and procedures, cash receipts

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan bagian sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. pendapatan daerah yang sah yang tertuju untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih berdasarkan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada Permendagri No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur Keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan daerah. Sistem dan prosedur akuntansi yang ada di pemerintah daerah yaitu: Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi selain kas, dan Prosedur Akuntansi Aset. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau di singkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing – masing instansi pemerintah.

Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah di rencanakan oleh Pemerintah. Kas di akui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak di batasi penggunaannya. Perubahan kas di pengaruhi oleh 2 aktivitas yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi transaksi – transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan rekening bank milik entitas pemerintah daerah, baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer, penerimaan pinjaman, maupun penerimaan lainnya. Kas dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran uang dalam kegiatan. Bahkan bisa juga memperhitungkan keuangan yang akan datang, begitu banyak fungsi dan kegunaan kas, dengan adanya kas maka bisa mengetahui proses terjadinya pengelolaan uang.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu lembaga pemerintahan pelestarian serta pemberdayaan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk meningkatkan promosi dan publikasi di bidang destinasi pariwisata dan meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kepariwisataan, mengembangkan industri pariwisata yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerimaan kas pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara harus adanya prosedur yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka dari itu sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas sangat perlu diperhatikan, karena Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara kurang dalam melakukan sosialisasi tentang prosedur penerimaan kas, sehingga masih ada petugas wajib retribusi yang kurang paham mengenai prosedur penerimaan kas yang ada di Dinas Pariwisata. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil judul “Evaluasi Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020”.

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas berdasarkan Permendagri No 77 tahun 2020.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Akuntansi**

Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis sebagai bahasa pengambilan keputusan konsep dasar akuntansi sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana pengelolaan data keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan (Rafael, 2017).

### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017), secara umum tujuan akuntansi pemerintah adalah memberikan dan menyajikan informasi pelaporan keuangan atas transaksi yang dilakukan pada periode tertentu. Tujuan akuntansi pemerintah secara khusus dijelaskan oleh Hasanah dan Fauzi (2017) antara lain :

1. Akuntabilitas
2. Manajerial
3. Pengawasan

**Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan atau sektor publik merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah atau organisasi yang memberikan jasa publik (Christy, 2019:5).

**Definisi Sistem dan Prosedur**

Definisi sistem menurut Kristanto (2018:1) adalah sistem merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran yang diinginkan.

**Sistem Akuntansi**

Pengertian sistem akuntansi, menurut Mulyadi (2016:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

- 1) Formulir
- 2) Jurnal
- 3) Buku besar
- 4) Buku Pembantu
- 5) Laporan

**Pengertian kas**

Menurut Rudianto (2018:83), kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan, setiap saat diinginkan.

**Pengertian Penerimaan kas**

Menurut Saragih (2018), penerimaan kas adalah kas yang diterima oleh perusahaan baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan.

**Fungsi Penerimaan kas**

Menurut Mulyadi (2016:385), fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas adalah :

1. Fungsi penjualan
2. Fungsi kas
3. Fungsi gudang
4. Fungsi pengiriman
5. Fungsi akuntansi

**Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang di peroleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang di miliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy, 2017:119).

**Pengelolaan keuangan daerah**

Menurut Khusaini (2018:2), pengertian pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

**Sistem Pengendalian Intern**

Mulyadi (2018:129) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

**Permendagri No 77 tahun 2020**

Pengelolaan Keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

**Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Penelitian Terdahulu**

Penelitian Asriyani, Halim, dan Nastiti (2020) bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas bagian unit rawat jalan di Puskesmas Sumbersari Jember. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah masih terdapat beberapa aspek yang masih harus diperbaiki pada sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang sudah dijalankan oleh Puskesmas Sumbersari Jember. Simpulan, sistem yang sudah dijalankan oleh Puskesmas Sumbersari Jember sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dan peraturan daerah yang berlaku serta sudah mengarah pada sistem yang baik. Namun pengembangan dari sistem tersebut belum sempurna atau masih terdapat kekurangan.

Penelitian Bilalang, Warongan, dan Datu (2021) bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif yang dimulai dengan pengumpulan data sampai pada ditarik kesimpulan. Penerimaan kas merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintahan untuk membangun program pembangunan pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan prosedur penerimaan kas sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berjalan dengan baik.

Penelitian Fiqgiya, Irwansyah, dan Kurniawan (2020) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian internal atas penerimaan kas RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan data-data mengenai sistem pengendalian internal penerimaan kas RSUD Ratu Aji Putri Botung. Dalam penelitian ini digunakan data primer, dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap narasumber terkait penerimaan kas RSUD. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut Mulyadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal atas penerimaan kas RSUD Ratu Aji Putri Botung ada beberapa yang belum sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal karena terdapat perangkapan tugas pada fungsi penerimaan kas yaitu fungsi pencatatan merangkap sebagai kasir, fungsi penerimaan kas merangkap sebagai pengeluaran dana talangan ambulan, penggunaan SIMRS yang belum maksimal, terlambatnya pengajuan klaim kepada debitur dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh fungsi pengawas internal RSUD secara mendadak pada fungsi penerimaan kas.

**METODE PENELITIAN****Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggunakan jenis data Kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di analisis serta di deskripsikan berdasarkan penemuan – penemuan fakta fakta penelitian di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

**Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Data primer dan Data Sekunder. Metode Pengumpulan Data yang digunakan Teknik wawancara, dan Teknik dokumentasi,

**Metode Analisis**

Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, terencana dan terstruktur sejak awal penelitian.

**Proses Analisis**

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas.
2. Menganalisis pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas.
3. Menarik kesimpulan dan memberikan hasil analisis sesuai atau tidak sesuai sistem dan prosedur penerimaan kas.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil penelitian****Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas**

Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Permendagri No 77 tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Petugas pemungut retribusi melakukan penagihan kepada wajib retribusi
2. Bendahara penerimaan kas menerima bukti transaksi yang di terima dari petugas pemungut retribusi dan bendahara menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi.
3. Bendahara melakukan verifikasi antara uang yang diterima dengan yang ditetapkan
4. Bendahara mencatat jurnal penerimaan kas di SIPD maka secara otomatis buku besar dan laporan keuangan seperti LRA, LO dan neraca sudah tersedia.
5. Kemudian Bendahara Penerimaan Kas akan membuat CALK ( Catatan Atas Laporan Keuangan) berdasarkan data yang ada di dalam SIPD.
6. Selanjutnya Laporan Keuangan akan diberikan kepada Pejabat Pengelola Retribusi, Kepala bidang Destinasi, PPK SKPD, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara untuk diperiksa jika sudah benar.
7. Setelah di tandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara bendahara penerimaan langsung menyetorkan semua uang yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Sistem Informasi Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan SIPD sebagai alat pembantu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih inovatif, transparan, efektif dan efisien.

**Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas**

Dalam melaksanakan siklus penerimaan kas, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Pengendalian Intern yang terdiri dari 5 komponen, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian.  
Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara membentuk struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan komponen – komponen dalam lingkungan pengendalian. Tujuan dibentuknya struktur organisasi agar wewenang dan tanggung jawab lebih jelas antara Kepala Dinas dengan bawahannya sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dapat berjalan dengan semestinya.
2. Terhadap Penilaian Risiko.  
Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan penilaian risiko dilakukan agar Kepala Dinas dapat menetapkan tujuan yang jelas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan juga menganalisis risiko sebagai dasar untuk mengelola risiko.
3. Terhadap Aktifitas Pengendalian.  
Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berfungsi untuk mengurangi risiko untuk pencapaian tujuan. Dalam sistem dan prosedur penerimaan kas, kegiatan pengendalian dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan untuk

penerimaan kas oleh bendahara yang kemudian diserahkan kepada pejabat pengelola retribusi, kepala bidang destinasi, PPK SKPD dan kepala Dinas Pariwisata untuk di tandatangani lalu disetor kepada rekening kas umum daerah.

4. Terhadap Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Untuk mewujudkan informasi keuangan yang memadai guna mendukung penyusunan laporan keuangan, bendahara penerimaan mengkomunikasikan seluruh informasi menyangkut penerimaan kas.

5. Terhadap Aktivitas Pemantauan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara memilih, mengembangkan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian ada dan berfungsi. Dalam penerimaan kas, bendahara penerimaan melakukan verifikasi, yaitu mencocokkan uang yang diterima dan yang ditetapkan, kemudian bendahara penerimaan mengeluarkan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi. bendahara penerimaan kas melaporkan laporan keuangan kepada pejabat pengelola retribusi, kepala bidang destinasi, PPK SKPD dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

## Pembahasan

### Evaluasi Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

Berdasarkan hasil penelitian sistem dan prosedur penerimaan kas sudah sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen yang digunakan oleh pihak terkait mulai dari Surat Tanda Bukti Pembayaran, STS, selanjutnya laporan yang dihasilkan mulai dari LRA, LO, Neraca dan CALK sudah sesuai dengan peraturan. Petugas pemungut retribusi melakukan penagihan kepada wajib retribusi, Bendahara penerimaan kas menerima bukti transaksi dari petugas pemungut retribusi dan menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi, bendahara melakukan verifikasi antara uang yang di terima dengan yang ditetapkan, kemudian melakukan pencatatan yaitu jurnal penerimaan kas menggunakan aplikasi SIPD dan secara otomatis sudah terbentuk laporan keuangan seperti LRA, LO, Neraca. Kemudian bendahara penerimaan kas akan membuat CALK berdasarkan data yang ada di dalam SIPD. Berikutnya bendahara penerimaan kas melaporkan laporan keuangan kepada pejabat pengelola retribusi, Kepala Bidang Destinasi, PPK-SKPD dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara untuk diperiksa jika sudah benar. Setelah di tandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Bendahara penerimaan langsung menyetorkan semua uang yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah. Prosedur Penerimaan Kas merupakan proses mulai dari pencatatan, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020.

**Tabel 1. Perbandingan Prosedur Penerimaan Kas Antara Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara**

No	Pelaksana	Langkah	Aktivitas	Keterangan	Hasil Penelitian
1	PPKD	1	Menyerahkan SKP yang telah di terbitkan kepada Bendahara dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan		Efektif
2	Pengguna Anggaran	2	Menyerahkan SKR yang telah diterbitkan kepada bendahara untuk keperluan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan	Sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020	Efektif
		3	Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan melalui PPK SKPD	Sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020	Efektif
3	Wajib retribusi	4	Menyerahkan uang (setoran retribusi)	Sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020	Efektif
4	PPK SKPD	5	Melakukan verifikasi atas penerimaan	Sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020	Efektif

5	Bendahara penerimaan	6	Melakukan verifikasi uang dengan SKR yang bersangkutan	Sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020	Efektif
		7	Mengeluarkan tanda bukti pembayaran	Sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020	Efektif
		8	Menyiapkan STS	Sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020	Efektif
		9	Melakukan penyetoran ke RKUD	Sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020	Efektif

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa prosedur penerimaan kas sudah sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 2. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara**

No	Unsur Sistem Pengendalian Intern	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif
1	Terhadap lingkungan pengendalian	Membentuk struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan komponen-komponen dalam lingkungan pengendalian. Agar wewenang dan tanggung jawab antara Kepala Dinas dan bawahannya jelas, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dapat berjalan dengan semestinya.	√		
2	Terhadap penilaian resiko	Kepala Dinas dapat menetapkan tujuan yang jelas untuk mengidentifikasi dan menilai resiko yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi, mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan diseluruh entitas.	√		
3	Terhadap aktivitas Pengendalian	Memilih dan mengembangkan aktivitas dan pengendalian yang berfungsi untuk mengurangi resiko untuk pencapaian tujuan. Dalam sistem dan prosedur penerimaan kas, kegiatan pengendalian intern dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan untuk penerimaan kas oleh bendahara yang kemudian diserahkan kepada pejabat pengelola retribusi, Kepala bidang destinasi, PPK SKPD dan Kepala Dinas untuk diperiksa jika sudah benar.	√		
4	Terhadap informasi dan Komunikasi	Menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian intern. Untuk mewujudkan informasi keuangan yang memadai guna mendukung penyusunan laporan, bendahara penerimaan mengkomunikasikan seluruh informasi		√	

5 Terhadap aktivitas pemantauan	<p>dari wajib retribusi, petugas retribusi menyangkut penerimaan kas</p> <p>Memilih, mengembangkan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian ada dan berfungsi dalam penerimaan kas. Bendahara penerimaan kas melakukan verifikasi, yaitu uang yang diterima dan yang sudah ditetapkan lalu bendahara mengeluarkan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi.</p>	√
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern penerimaan kas pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan 5 unsur pengendalian intern sudah terlaksana namun pada unsur informasi dan komunikasi masih kurang efektif karena masalah jaringan yang kurang memadai.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara mengenai Evaluasi Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas berdasarkan Permendagri No 77 tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut .

1. Hasil Evaluasi Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020 dan dilakukan dengan baik mulai dari pihak pihak terkait, dokumen yang digunakan dan laporan keuangan yang di hasilkan.
2. Melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat membantu terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata, selain itu juga memudahkan yang direncanakan.
3. Secara keseluruhan sistem pengendalian intern khususnya terhadap penerimaan kas telah berjalan dengan baik.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang sekiranya dapat diberikan untuk Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

1. kepada Kepala Dinas Pariwisata agar selalu membuat pelatihan kepada pegawai supaya Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas semakin dikembangkan sesuai dengan Permendagri yang telah dibuat oleh pemerintah, terutama dalam melakukan pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan agar selalu cepat mengatasi masalah yang terjadi.
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah telah dilakukan dengan baik, tapi perlu juga untuk melihat sistem jaringan dalam menggunakan aplikasi karena jaringan yang kurang memadai dapat menghambat penggunaan aplikasi .
3. Dinas Pariwisata diharapkan untuk dapat lebih lagi mempertahankan sistem pengendalian intern yang sudah berjalan dengan baik terlebih khusus dalam unsur informasi dan komunikasi agar jaringan dapat ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kendala dalam informasi dan komunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asriyani, D. W., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Bagian Unit Rawat Jalan. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, Vol. 2, No. 1, 79-88. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/BUDGETING/article/view/782>. Diakses pada 4 April 2022

- Bilalang, J. S., Warongan, J. D., & Datu, C. (2021). Analisis Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, 173 – 181, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32008>. Diakses pada 9 September 2022
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dala Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Christy, N. N. A. (2019). *Komunikasi Bisnis*. Semarang: Radna Andi Wibowo.
- Fiqqiya, N., Irwansyah, I., & Kurniawan, I. S. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah. *Akuntabel*, Vol. 17, No. 1, 80-86. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/7310>. Diakses pada 1 April 2022
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: In Media
- Kristanto, A. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*. Vol. 1, Edisi Revisi. Yogyakarta: Gava Media
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Ub Press.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rafael, D. (2017). *Akuntansi Dasar – Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi
- Rudianto. (2018). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga
- Saragih, V. F. R. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Medan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/6548/>. Diakses pada 24 November 2022
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah